

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



**LAPORAN KINERJA INTANSI
PEMERINTAH
(Lkjlp)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**

**SIMPANG EMPAT
BULAN JANUARI TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjLP) ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023. dengan tujuan sebagai perwujudan dan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan 5 (Lima) Program, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik. Mengenai capaian indikator kinerja kegiatan tersebut akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat


IMTER PEDRI, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19710704 199710 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN**
 - A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI**
 - B. STRUKTUR ORGANISASI**
 - C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI**
 - D. SUMBER DAYA MANUSIA INSTANSI**
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
 - A. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2023**
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
 - A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
 - B. REALISASI ANGGARAN**
- BAB IV PENUTUP**
 - A. KESIMPULAN**

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yaitu **"TERSELENGGARANYA SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL, EFektif, Efisien menuju Masyarakat Berwawasan Informasi"**, dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika ;
2. Menyediakan sarana dan prasana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah ;
3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi ;
4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksebilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi ;
5. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan informasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan, 9 (Sembilan) kegiatan dalam 5 (Lima) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023, untuk mendukung pencapaian 5 (Lima) sasaran dalam 10 (Sepuluh) indikator kinerja (outcome/output) dan 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan Pemerintah dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi Pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta kaporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target Kinerja yang harus dicapai Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, yang merupakan pjabaran dari Visi, Misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat .

1.2.LANDASAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang perubahan petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3.STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	: IMTER PEDRI, S.Pd,M.Si
• Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	: IRMARETATI, S.IP,MM
• Kepala Bidang Layanan E- Government dan APTIKA	: SUNARTO, S.Pd
• Kepala Bidang Statistik dan Persandian	: AMIRI, SH
• Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	: YUDHINAL REVIOLA, SE
• Kasubag Umum dan Kepegawaian	: ENDANG SUSANTI,SE
• Perencana Ahli Muda	: ZAKIRMAN,SH
• Kasi Persandian	: -
• Kasi Keamanan Informasi	: -
• Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi	: -
• Pranata Humas Ahli Muda	: OKTAVIANTA
• Kasi Pengelola Komunikasi Publik	: -
• Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	: -
• Pranata Komputer Ahli	: RETNO ASTUTI, S.KOM
• Bendahara Pengeluaran	: Santi Prestika Dora, S.ST.P
• Perancang Grafis	: FERA FERDIAN, S.Kom
• Analisi Berita	: Titik Rosanti,S.Psi
• Operator Komunikasi	: Tiara Oktaviani, A.Md.T
• Analis Berita	: Nazia Elvina, S.I.Kom
• Pengelola Situs dan Web	: Algib,A.Md
• Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	: Yetti Oktavia, S.Sos.MM
• Analisi Tata Kelola Keamanan Siber Dasman,S.Kom	: Zaki Minango
• Teknisi Jaringan Instalasi A,Md	: Rahmat Junico Hamzah,
• Operator Sandi dan Telekomunikasi	: Yesi Putri Hanifa, A.Md
• Sopir	: ARNOLI

1.4.TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan/atau
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.5.SUMBER DAYA MANUSIA INSTANSI

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika keadaan pada tanggal 2 Januari 2023 adalah sebanyak 57 orang dan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 53 orang dengan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 2 Januari 2023 (orang)	Keadaan 31 Desember 2023 (orang)
IV	2	2
III	13	13
II	5	5
I	-	-
Honor dan Tenaga Kontrak	37	34
Daerah		
Jumlah	57	53

Latar belakang pendidikan aparatur :

Pendidikan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 2 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
S3	-	-
S2	1	-
S1	33	32
DIII	9	9
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	14	12
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	57	53

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan perjanjian kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2023 dengan Bupati Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, trasparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian Kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP	B
		2. Persentase Penurunan temuan pemeriksaan	8
		3. Level Maturitas SPIP	2,11
2	Meningkatnya konektivitas antar instansi, layanan publik melalui layanan elektronik dan penyebarluasan tentang kebijakan dan pemerintah daerah	Indeks Maturitas SPBE 1. persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. % Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 3. Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota.	3 100 % 10% 100%
3	Meningkatnya penggunaan dan Statistik dalam pengambilan keputusan	1. OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan nilai SAKIP	85
4	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik serta komprehensif dan implementasi	Indek KAMI	1
5	Meningkatkan Pelayanan aplikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5 %

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp.5.430.702.974 yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program dengan 9 Kegiatan dan 19 sub kegiatan. Rincian lengkapnya disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.441.365.936	
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.086.341.600	
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp.	1.902.995.440	
4.	Program Pengelolaan E-Goverment	Rp.	209.536.450	
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	16.746.450	
6.	Program Pemeliharaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	72.032.000	

No	Kegiatan		SEBELUM	SESUDAH
1	Administrasi Keuangan	Rp	2.282.511.634	1.997.503.894
2	Administasi Umum Perangkat Daerah	Rp	203.525.590	270.698.490
3	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp	56.728.450	37.284.450
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp	78.996.450	135.879.100
5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	1.014.701.950	1.086.341.600
6	Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Rp	1.419.596.350	1.693.458.640
7	Pengelolaan E- Government	Rp	209.536.450	209.536.450
8	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16.699.450	16.699.450
9	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	63.062.000	72.032.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan membandingkan antar target kinerja dengan realisasi kinerja. Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2023 terdiri atas 5 (Lima) program yang didukung dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya. Untuk menilai ketercapaian kinerja digunakan klasifikasi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

3.2 Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2023 merupakan rangkaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Adapun Sasaran Indikator dan Capaian Kinerja DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel. 3.2

Tabel 3.2

Penilaian Capaian Kinerja DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)
1	Nilai Sakip	B	B	100
2	Level Maturitas SPIP	2,48	3	90
3	Persentase Penurunan temuan BPK	85%	100%	100
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh kominfo	100	100	100
5	% layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegritas	10	10	100
6	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui	100	100	100

Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota					
7	Nilai Capaian kemajuan penyelenggaran Statistik Sektoral (EPSS)	2	1,58	100	
8	OPD yang menggunakan Data Statistik dalam penyusunan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP	90%	52%	100	
9	Indeks KAMI	2	2	100	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85%	100	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 10 Indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan pada kurun waktu 2021- 2026. Secara umum pada tahun 2023 indikator sasaran yang menjadi indikator teknis dari fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

1. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1 diukur melalui pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP Kabupaten Pasaman Barat oleh Kementerian PAN-RB yang dirilis pada tahun 2023. Berdasarkan surat Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2023 dengan Skor 3.132 dengan rincian pada komponen perencanaan kinerja memperoleh Level 3 yang di kategorikan Predikat (Baik) .Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja baik.
2. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2 penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level terdefinisi atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,00” (nilai pada KK LEAD_SPIP) Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisisebagai berikut.

Uraian	Populasi	NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,5 3%	0	0,00 %	4	10,5 3%	30	78,9 5%	0	0,00 %	0	0,00 %
2) MRI	38	4	10,5 3%	0	0,00 %	14	36,8 4%	20	52,6 3%	0	0,00 %	0	0,00 %
3) IEPK	38	4	10,5 3%	2	5,26 %	19	50,0 0%	13	34,2 1%	0	0,00 %	0	0,00 %
4) APIP	38	1	2,63 %	2	5,26 %	3	7,89 %	32	84,2 1%	0	0,00 %	0	0,00 %
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36 %	25	4,92 %	140	27,5 6%	331	65,1 6%	0	0,00 %	0	0,00 %
2) MRI	508	12	2,36 %	37	7,28 %	341	67,1 3%	118	23,2 3%	0	0,00 %	0	0,00 %
3) IEPK	508	12	2,36 %	68	13,3 9%	395	77,7 6%	33	6,50 %	0	0,00 %	0	0,00 %
4) APIP	508	0	0,00 %	27	5,31 %	118	23,2 3%	363	71,4 6%	0	0,00 %	0	0,00 %

Dengan tingkat maturitas terdefinisi maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat :

1. Telah mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
2. Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
3. Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
4. Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
5. Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
6. Pencapaian Sasaran 3 indikator kinerja terkait dukungan OPD terhadap Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang diukur melalui penilaian terhadap pelaksanaan SAKIP DAN SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam upaya Penurunan Persentase Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, dari penilaian tersebut bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika berada di nilai 0,40% masih terdapat temuan berupa Dokumen pendukung atas kinerja OPD. Masih diperlukan upaya yang optimal untuk keandalan penyajian laporan keuangan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana efektif dan efisien.
7. Pada Sasaran indikator kinerja ke 4 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat merupakan organisasi yang berhubungan dengan lancarnya sebuah kegiatan yang berkaitan dengan sistem jaringan, maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Sasaran Strategis untuk Meningkatkan Konektifitas antar Instansi, Layanan Publik melalui layanan elektronik dan Penyebarluaskan tentang kebijakan dan Pemerintah Daerah,Sasaran Strategis ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan E-Government. Pada Tahun 2023 Persentase OPD yang terhubung dengan Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mencapai hasil yang baik, dengan nilai target 100% untuk 42 OPD yang di Kabupaten Pasaman Barat.
8. Indikator Kinerja 5 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat memiliki Target Persentase layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi adalah 10 %, meskipun capaian hasil dari target 100 % namun Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara Online dan Terintegrasi masih perlu di efektifkan karena masih banyak layanan Publik yang belum diselenggarakan secara Online dan terintegrasi di OPD Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pada sasaran strategis 6 indikator kinerja Masyarakat juga menjadi sasaran penyebaran informasi publik,kebijakan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik.Sasaran Strategis ini diukur dari banyak nya masyarakat yang memiliki aspek komunikasi dan juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan Informasi Publik, Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informasi mendorong masyarakat untuk meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan Pemerintah dengan melalui berbagai media.
- 10.Indikator Kinerja 7 merupakan terwujudnya satu data Indonesia di Kabupaten Pasaman Barat sumber sasaran ini berdasarkan Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.Tolak ukur Indikator Kinerja di peroleh dari data yang dikumpulkan dari OPD Kabupaten Pasaman Barat, menyimpan, menganalisis, dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada Pimpinan untuk pengambilan keputusan.

11. Indikator Kinerja 8 data yang di peroleh dari OPD yang ada di Kabupaten Pasaman Barat masih belum efisien karena data yang di diperoleh dari OPD terkait belum lengkap, maka OPD yang menggunakan data Statistik masih kurang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP.pada tahun 2023 Target Kinerja yang di peroleh sebersar 85% dengan capaian 100% meskipun demikian data yang dibutuhkan belum terpenuhi sesuai Sasaran Strategis.
12. Indikator Kinerja 9 Pembangunan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian.Tolak Ukur dalam melaksanakan Sasaran Strategis Penyiapan bahan penyusunan pefrencanaan program, penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antara perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
13. Pada indikator kinerja 10 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan program pemerintah daerah dalam pengolahan komunikasi publik melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat, berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.Tolak Ukur Sasaran Strategis lembaga profesi komunikasi dan informasi masyarakat,lembaga komunikasi dan informasi pemerintah,melaksanakan penyuluhan dan sosialiasasi dalam rangka pengembangan Bidang usaha yang berbasis teknologi Informatik.

3.3 Perbandingan Analisis Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Dalam rangka melihat adanya kinerja yang telah dilakukan, maka perlu membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya,ada atau tidak progres capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam perencanaan jangka menengah (Resntra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat. Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja mengalami Peningkatan dari tahun 2023 seperti tabel yang di tetapkan.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD (Tahun)		Realisasi Capaian (Tahun)		Rasio Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Nilai Sakip	B	B	B	B	100	100
2	Level Maturitas SPIP	2,35	2,48	2,11	2,48	100	100
3	Percentase Penurunan temuan BPK	80%	85%	100%	100%	100	100
4	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh kominfo	100	100	100	100	100	100
5	% layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegritas	10	10	10	10	100	100
6	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan	100	100	100	100	100	100

Kab/Kota							
7	Nilai Capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) OPD yang menggunakan Data Statistik dalam penyusunan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP	2	2	2,07	1,58	100	100
8		85	90	52	52	100	100
9	Indeks KAMI	1	1	1	1	100	100
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	85	0	85	100	100

Berdasarkan tabel diatas, target dinaikan dari tahun sebelumnya agar ada peningkatan kinerja yang harus di capai. Rincian gambaran tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Nilai Sakip

Pada tahun 2022 Nilai Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Target B Menapatkan rasio capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 masih berada pada target B dengan rasio capaian 100% , dapat di lihat bahwa target capaian Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mengalami penurun atau pun peningkatan , meskipun rasio capaian 100% namun masih banyak perbaikan kinerja yang harus di penuhi.

2. Sasaran 2 : Persentase Temuan BPK

Pada tahun 2022 target untuk memenuhi persentase temuan BPK adalah 80 dengan rasio 100 rasio persentase temuan BPK tersebut mengalami peningkatan .pada tahun 2023 rasio persentase temuan BPK mengalami penurunan 85 % , meskipun mengalami Kenaikan di perlukan pendampingan dan perhatian yang interatif dalam penyusunan dokumen perencanaanya.

3. Sasaran 3 : Level Maturitas SPIP

Pada tahun 2022 target Level Maturitas SPIP adalah 2,35 dengan Rasio Capaian 2,11, Rasio yang di peroleh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika belum memenuhi capain kinerja ,meskipun belum memenuhi capaian kinerja Level Maturuitas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Dengan tingkat maturitas terdefinisi. Dan pada tahun 2023 degan target 3 mengalami peningkatan sebesar 2,48 dengan rasio capaian 100 % , meskipun megalami peningkatan capaian kinerja sasaran Level Maturitas SPIP masih belum di kategorikan atau belum memenuhi target capaian kinerja.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Diskominfo

Dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan, target yang ditetapkan harus berpedoman pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah. Dalam renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan target yang harus dicapai dari tahun 2023 hingga tahun 2026. 2026 merupakan target akhir yang ingin dicapai dalam periode lima tahun.

Tabel 3.4
Capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023 dan Target Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Target Renstra
		Target	Capaian	2026
1	Nilai Sakip	B	B	B
2	Level Maturitas SPIP	2,48	2,48	>2,6
3	Persentase Penurunan temuan BPK	85%	85%	100%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh kominfo	100	100	100
5	% layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegritas	10	10	35
6	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100	100	100
7	Cakupan pemenuhan asesmen dan evaluasi penerapan keamanan informasi Daerah	1	1	2
8	OPD yang menggunakan Data Statistik dalam penyusunan pembangunan daerah peningkatan nilai SAKIP	90%	90%	100%
9	Indeks KAMI	1	1	2
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85%	85

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi ini di pandang sebagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

- a) Penyebab Kegagalan /Penurunan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika belum dapat menjangkau daerah Kabupaten Pasaman Barat, baik ditempat – tempat strategis terutama di Jorong/nagari terpencil.
2. Sumber Daya Manusia yang mempunyai basik pengetahuan di bidang Komunikasi dan Informatika belum mencukupi
3. Kepatuhan Masyarakat terhadap Undang-Undang Komunikasi membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
4. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan masih terbatas
5. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Komunikasi dan Informatika.

- b) Solusi dari permasalahan atau kendala diatas adalah:

1. Peningkatan SDM
2. Peningkatan Kerjasama dengan beberapa Instansi terkait
3. Melakukan Koordinasi secara internal dan eksternal
4. Melakukan Sosialisasi bersama Masyarakat terhadap Undang-Undang Komunikasi
5. Mengkondisikan Sarana dan Pelayanan untuk peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kinerja.
6. Adanya Perbaikan dalam mekanisme perencanaan terintegrasi dengan penganggaran melalui aplikasi.

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dari sumber daya keuangan. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang capaian sasaran organisasi. Semakin tinggi penyerapan anggaran maka output (realisasi) kegiatan semakin tercapai, namun harus mampu meghemat anggaran tidak terjadi pemborosan. Suatu anggaran dikatakan efisien apabila tersebut dapat dihemat dan tidak ada pemborosan. Resio efisiensi anggaran merupakan keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 sebesar Rp.5.430.702.974 dan Realisasi Rp. 5.027.180.184

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri 3 sub kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp 1.761.998.894,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 1.728.412.526 atau 98%

Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp.149.975.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp 149.975.000,- atau 99%

Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp.85.530.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp.

85.530.000 atau 100%

Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub kegiatan :

- I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 1.401.000- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%
Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- II. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 50.600.200- dengan realisasi Rp. 50.597.950,- atau 100%
Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- III. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 2.470.340- dengan realisasi Rp. 2.470.340,- atau 100%
Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- IV. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 216.266.950,- dengan realisasi Rp. 214.702.066,- atau 99%
Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

V. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 37.284.450,- dan realisasi sebesar Rp. 36.758.400,- atau 99,83% dengan realisasi fisik 100 %.
Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

4. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 3 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

VI. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 5.852.200,- dan realisasi sebesar Rp. 5.137.600,- atau 88% dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

VII. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 110.896.900,- dan realisasi sebesar Rp. 107.712.920,- atau 98% dengan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

VII. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 19.130.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.050.000,- atau 99% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 sub kegiatan :

1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 329.986.100,- dan realisasisebesar Rp. 327.371.809,- atau 98% dengan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

2. Layanan Hubungan Media

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 557.914.700,- dan realisasisebesar Rp. 548.187.500 atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.198.440.800,- dan realisasisebesar Rp. 198.366.300 atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

6. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari 1 sub kegiatan.

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.1.693.458.990,- dan realisasisebesar Rp. 1.693.197.340,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

7. Pengelolaane-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.163.185.000,- dan realisasisebesar Rp. 163.197.340,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.46.351.450,- dan realisasisebesar Rp 46.348.200,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**8. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpul,Pengolah,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.16.749.450,-,dan Realisasi sebesar 16.706.550,-, atau 100% dengan realisasi fisik 100%

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**9. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 50.411.250,- dan realisasisebesar Rp. 48.855.100,- atau 92,41% dengan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

3.8. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki anggaran Rp. 5.430.702.974., dengan realisasi sebesar Rp. 5.027.180.184,- atau 90% dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN(Rp)	KEUANGAN(%)
Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.761.998.894	1.728.412.526	98
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.975.000	147.975.000	98
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.530.000	85.530.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.401.000	0	0
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.600.000	50.597.950	99
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.470.340	2.470.340	100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.226.950	214.702.066	99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
n	Pengadaan Peralatan			nn

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.852.200	5.137.600	87
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.896.900	107.712.920	97
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.130.000	19.050.000	99
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
12	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	329.986.100	327.371.809	99
13	Layanan Hubungan Media	557.914.700	548.187.500	98
14	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	198.440.800	198.366.300	99
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
15	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.693.458.990	1.693.197.340	99
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
16	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	163.185.000	163.155.850	99
17	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	46.351.450	46.348.200	99
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkupan Daerah Kabupaten /Kota				
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	16.749.450	16.706.550	99
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
19	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.032.000	71.929.109	100

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah mendukung pelaksanaan good governance untuk melaporkan capaian kinerja dan keuangan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. LKjIP sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah karena menilai rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran yang terukur serta berkelanjutan. Selain itu LKjIP juga alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Tujuan dan Sasaran strategis sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan yang diamanahkan kepada Kepala Perangkat Daerah. Indikator dari Indeks Profesionalitas ASN menjadi catatan untuk pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat pada tahun berikutnya. Rendahnya capaian indicator ini berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pada Tahun 2023 ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya up date data pada Sistem Informasi Kepegawaian sehingga ketersediaan data pegawai yang up to date dan dapat diakses dengan mudah guna keperluan pemenuhan pengukuran IP ASN, layanan administrasi kepegawaian dan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan belum bisa disajikan secara realtime
2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi sebagai inovasi untuk mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian
3. Masih rendahnya pencapaian manajemen pengelolaan ASN terutama penerapan system merit.
4. Penerapan system merit yang belum optimal.

4.1 Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 19 Kegiatan dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2023, untuk mendukung pencapaian 5 sasaran dan 5 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 5 Indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran / penilaian.
3. Belum optimalnya pencapaian target indicator kinerja sasaran disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan.

4.2 Strategis dan pemecahan Masalah

1. Mendorong Efektivitas pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menyelarasakan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dengan Tujuan dan sasaran berbasis outcome dan output kinerja dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program/kegiatan
4. Meningkatkan kauntitas dan kualitas/kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan melalui kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan teknis yang mendukung tupoksi perencanaan.
5. Review dan evaluasi dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Simpang Empat, Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



IMTER PEDRI, S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19710704 199710 1 001